



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA
MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal 1

Mendelegasikan wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut pada lajur 3, untuk menetapkan naskah dinas dan melaksanakan kegiatan bidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 2 bagi ASN sebagaimana tersebut dalam lajur lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tersebut dalam lajur 4, untuk atas nama Bupati Pekalongan menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 2 bagi ASN sebagaimana tersebut dalam lajur lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.

Pasal 4

Dalam hal pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan, maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi yang diberi kuasa.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 28), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

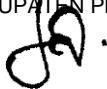
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 15 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENETAPKAN DAN DIBERI KUASA MENANDATANGANI NASKAH DINAS
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	SURAT/NASKAH DINAS	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI ASN GOL.RUANG/ JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pengangkatan CASN		Kepala BKPSDM	CPNS Gol. I/a, I/c, II/a, II/b, II/c, III/a dan III/b serta PPPK semua kelas	
2	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pengangkatan menjadi ASN		Kepala BKPSDM	CPNS Gol. I/a, I/c, II/a, II/b, II/c, III/a dan III/b serta PPPK semua kelas	Kecuali bagi CPNS yang tewas atau cacat karena dinas
3	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Kenaikan Pangkat		Kepala BKPSDM	Gol. III/a s.d. III/d	Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian
			Kabid Mutasi dan Promosi Pegawai ASN BKPSDM	Gol. I/b s.d. II/d	
4	Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemindehan antar Perangkat Daerah		Sekretaris Daerah	Gol III/a ke atas	
			Kepala BKPSDM	Gol I/a s/d II/d	
5	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemindehan antar Perangkat Daerah		Kepala BKPSDM	Gol III/a keatas	
			Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM	Gol I/a s/d II/d	
6	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pengangkatan, Pemindehan Dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural		Sekretaris Daerah	Eselon II.b dan III	
			Kepala BKPSDM	Eselon IV dan V	
7	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan Tentang Pengangkatan Pertama, Penyesuaian, Kenaikan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan kembali dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.		Sekretaris Daerah	Gol. IV/a ke atas	
			Kepala BKPSDM	Gol. II/a s.d. III/d	

1	2	3	4	5	6
8	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional		Sekretaris Daerah	Gol. IV	
			Kepala BKPSDM	Gol. III	
9	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pengaktifan kembali sebagai PNS		Sekretaris Daerah	Semua Gol. / Ruang	
10	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemberhentian sementara dari jabatan negeri		Sekretaris Daerah	Semua Gol / Ruang	Termasuk pejabat fungsional jenjang Muda/Penyelia ke bawah
11	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemberhentian sementara dari jabatan organis		Kepala BKPSDM	Golongan I/c ke atas	Bagi PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa atau diperbantukan pada lembaga lain (Fungsional dan Struktural)
12	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Tugas Belajar		Kepala BKPSDM	Semua Gol / Ruang	
13	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penempatan kembali setelah tugas belajar		Kepala BKPSDM	Semua Gol / Ruang	
14	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Peninjauan Masa Kerja		Kepala BKPSDM	Gol. III/a Ke atas	
			Kabid Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM	Gol. I/a s.d. II/d	
15	Petikan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penetapan Pegawai tidak tetap		Kepala BKPSDM		
16	Surat Perintah tentang Perpindahan PTT Daerah antar Perangkat Daerah	Kepala BKPSDM			

1	2	3	4	5	6
17	Surat izin cuti :				
	a. Cuti tahunan, cuti sakit yang tidak lebih dari 14 hari,	Sekretaris Daerah		Asisten Sekda dan Kepala Perangkat Daerah	
		Asisten Administrasi Sekda		Semua Gol / Ruang	Di lingkungan Setda
		Kepala Perangkat Daerah		Semua Gol / Ruang	Di lingk. Perangkat Daerah masing-masing
	b. Cuti karena alasan penting, cuti bersalin, cuti besar dan cuti sakit yang lebih dari 14 hari		Sekretaris Daerah	Gol IV/a keatas	Kecuali cuti yang dilaksanakan di luar negeri
			Kepala BKPSDM	Gol. I/a s.d. III/d	
18	Surat Izin Belajar		Sekretaris Daerah	S-3	
			Kepala BKPSDM	S-2 ke bawah	
19	Surat Tugas Belajar		Sekretaris Daerah	S-3	
			Kepala BKBKPSDM	S-2 ke bawah	
20	Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik		Sekretaris Daerah	S-3	
			Kepala BKPSDM	S-2 ke bawah	
21	Surat Keterangan Perolehan Ijazah		Sekretaris Daerah	Semua jenjang	
22	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG)	Sekretaris Daerah		Gol. IV/a s.d. IV/b	Di Lingkungan Setda
		Asisten Administrasi Sekda		Gol. III/a s.d. III/d	Di Lingkungan Setda
		Kabag Organisasi & Kepegawaian Setda		Gol. I/a s.d. II/d	Di Lingkungan Setda
		Kepala Perangkat Daerah		Semua Gol. / Ruang	Di lingkungan Perangkat Daerah masing- masing
23	Surat Pemberitahuan Penghentian Pembayaran Gaji	Asisten Administrasi Sekda		Semua Gol / Ruang	Di lingkungan Setda
		Kepala Perangkat Daerah		Semua Gol / Ruang	Di lingkungan Perangkat Daerah masing- masing


1	2	3	4	5	
24	Pengambilan Sumpah Jabatan, Penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan dan Berita Acara		Sekretaris Daerah	Eselon III	Di Bagian Masing-masing dalam Lingkungan Setda
			Para Asisten Sekda	Eselon IV	
			Kepala Perangkat Daerah	Eselon IV / V	
25	Pengambilan Sumpah / Janji ASN dan Penandatanganan Berita Acara		Asisten Administrasi Sekda		Di Lingkungan Setda
			Kepala Perangkat Daerah		Di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
26	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Asisten Administrasi Sekda	Semua Gol / Ruang	Semua Gol / Ruang	Di Lingkungan Setda
		Kepala Perangkat Daerah	Semua Gol / Ruang	Semua Gol / Ruang	Di Lngkungan Perangkat Daerah Masing-Masing
27	Pengesahan salinan dan petikan SK				
	a. Keputusan pengangkatan CPNS	Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingk. BKPSDM		Semua Gol / Ruang	
	b. Keputusan Pengangkatan PNS	Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingk. BKPSDM		Semua Gol / Ruang	
	c. Keputusan Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional	Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingk. BKPSDM		Semua Gol / Ruang	
	d. Keputusan Kenaikan Pangkat	Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingk. BKPSDM		Semua Gol / Ruang	

1	2	3	4	5	
	e. Keputusan Penunjukan Tugas Belajar	Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingk. BKPSDM		Semua Gol / Ruang	
	f. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan	Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingk. BKPSDM		Semua Gol / Ruang	
	g. Surat Izin Belajar / Keterangan Belajar/Penggunaan Gelar Akademik	Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingk. BKPSDM		Semua Gol / Ruang	
28	Keputusan pemberian izin perceraian dan surat keterangan melakukan Perceraian	Asisten Administrasi Sekda		Gol. III/a ke atas	
		Kepala BKPSDM		Gol. I/a s/d II/d	
29	Surat Perintah Penugasan Pelatihan Kepemimpinan		Sekretaris Daerah	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	
			Kepala BKPSDM	Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	
30	Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional		Kepala BKPSDM	Semua Gol/Ruang	
31	Surat laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS tewas atau cacat	Asisten Administrasi Sekda	Semua Gol / Ruang		Di lingkungan Setda
		Kepala Perangkat Daerah	Semua Gol / Ruang		Di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
32	Nota usul atau persetujuan Kepala BKN : a. Pengangkatan CPNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang lebih dari 2 tahun.		Kepala BKPSDM	Gol. I/a, I/c, II/a, II/b, II/c, III/a dan III/b.	

1	2	3	4	5	
	b. Pengaktifan kembali		Sekretaris Daerah	Semua Gol. / Ruang	
	c. Kenaikan pangkat		Kepala BKPSDM	Gol. III/a s.d IV/b	
			Kabid Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM	Gol. I/b s.d II/d	
33	Surat keterangan uraian tugas	Asisten Administrasi Sekda		Semua Gol / Ruang	Di Lingkungan Setda
		Kepala Perangkat Daerah		Semua Gol / Ruang	Di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
34	Surat pernyataan persetujuan pindah (lolos butuh)		Sekretaris Daerah	Semua Gol / Ruang	
35	Surat Penghadapan Mutasi ke Luar Daerah		Kepala BKPSDM	Semua Gol / Ruang	
36	Surat Pengantar Usul Pengangkatan CASN		Kepala BKPSDM	Semua Gol / Ruang dan Kelas	
37	Surat pengantar usul :				
	a. KARPEG, KARIS, dan KARSU		Kepala BKPSDM	Semua Gol / Ruang	
	b. Kenaikan pangkat		Kepala BKPSDM	Gol. IV/b ke bawah	
	c. Pensiun		Kepala BKPSDM	Gol. III/a s.d IV/a	
Kabid Mutasi dan promosi ASN BKPSDM			Gol. I/b s.d II/d		
38	Permohonan penetapan NIP CPNS dan NI PPPK		Kepala BKPSDM	Semua Gol / Ruang dan Kelas	
39	Surat Permintaan Pengujian kesehatan kepada dokter penguji Tersendiri atau Tim penguji kesehatan PNS	Asisten Administrasi Sekda		Semua Gol / Ruang	Di Lingkungan Setda
		Kepala Perangkat Daerah		Semua Gol / Ruang	Di Lingkungan Perangkat Daerah Masing- masing

1	2	3	4	5	6
40	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.	Asisten Administrasi Sekda		Semua Gol / Ruang	Di lingkungan Setda dan Perangkat Daerah yang dikepalai oleh Pejabat Administrator.
		Kepala Perangkat Daerah yang dikepalai JPT Pratama		Semua Gol / Ruang	Di lingkungan Perangkat Daerah masing – masing
41	Surat Perintah pembentukan tim pemeriksa untuk pelanggaran disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.		Kepala Perangkat Daerah	Semua Gol / Ruang	Untuk Pelanggaran disiplin berat ASN di lingkungan Perangkat Daerah Masing-masing kecuali pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah
42	Laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS		Kepala BKPSDM		
43	Perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Sekretaris Daerah		Semua golongan	
44	Surat Perintah Tugas penunjukan Plt. dan Plh.		Kepala Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Administrator selain Kepala Perangkat Daerah. - Pejabat Pengawas - Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan ditugaskan. 	Di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing

Diundangkan di Kajen
 Pada tanggal 15 Desember 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
 TTD
 M. YULIAN AKBAR
 BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 59
 Salinan sesuai dengan aslinya,
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


 AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19770906 199703 1 005

BUPATI PEKALONGAN,

TTD
 FADIA ARAFIQ